

Ancaman Intoleransi Terhadap Dasar Negara Pancasila Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Ideologi Wilayah (Studi Di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Periode 2019-2020)

Agus Budiman

Universitas Galuh, Indonesia
email: abuy.agus.budiman@gmail.com

Otong Husni Taufiq

Universitas Galuh, Indonesia
email: otonghusnitaufiq@unigal.ac.id

Egi Nurholis

Universitas Galuh, Indonesia
email: eginurholis@gmail.com

Dikirim; 27-9-2022; Direvisi;27-12-2022; Diterima; 28-12-2022

ABSTRACT

Pancasila was the ideology of the Indonesian nation. The application of Pancasila values needed to be carried out by every Indonesian citizen to create good citizens and be able to implement Pancasila values in everyday life such as religious tolerance so that it would increase national resilience. There was the threat of intolerance to the Pancasila state basis and its implications for regional ideological resilience, especially in Tasikmalaya.

This research used a case study design using various data collection procedures to describe the response to an event in a certain period. The data collection techniques used in this study were observation, interviews and documentation, while the data analysis techniques in this study were data reduction, data presentation, and concluding.

*The problem regarding the resilience of the Pancasila ideology was currently a polemic for the Indonesian nation. The emergence of various issues of the movement for the formation of a religion-based state to the practice of understanding and changing ideology in various aspects of life, intolerance towards religious people, one of which was the extrinsic understanding of religion. Pancasila was a unifying tool for the Indonesian nation so as not to be divided. The basis of the unitary state had values that were extracted from Indonesia, meaning that it was extracted and taken from the wealth, spirituality, morals and culture of the Indonesian people and nation. The attitude of tolerance must be upheld to fight the growing anti-tolerance or intolerance. *Bhinneka Tunggal Ika* and Pancasila values were used as the basis in efforts to fostered harmony in the life of society, nation and state.*

Keywords: Intolerance; Pancasila; Religious Organizations; Ideological Resilience

ABSTRAK

Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia. Penerapan nilai-nilai Pancasila perlu dilakukan oleh setiap warga negara Indonesia agar terciptanya warga negara yang baik serta mampu mengimplementasikan nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari seperti toleransi umat beragama sehingga akan meningkatkan ketahanan nasional. Tujuan

penelitian ini yaitu mengetahui sejauh mana ancaman Intoleransi Terhadap Dasar Negara Pancasila dan Implikasinya Kepada Ketahanan Ideologi Wilayah terutama di Tasikmalaya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kasus dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data untuk menggambarkan respon dari suatu peristiwa pada periode tertentu, Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi sedangkan untuk teknik analisis data pada penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data, dan mengambil kesimpulan.

Permasalahan mengenai ketahanan ideologi Pancasila saat ini menjadi polemik bangsa Indonesia. munculnya berbagai isu gerakan pembentukan negara berbasis agama sampai dengan praktik-praktik pemahaman dan perubahan ideologi di berbagai aspek kehidupan sikap intoleransi terhadap umat beragama salah satunya adalah pemahaman agama yang bersifat ekstrinsik Pancasila menjadi sebuah alat pemersatu bangsa Indonesia agar tidak terpecah belah, Pancasila adalah ideologi dan dasar negara kesatuan memiliki nilai yang digali dari Indonesia, artinya digali dan diambil dari kekayaan, rohani, moral dan budaya masyarakat dan bangsa Indonesia. Sikap toleransi harus ditegakkan untuk melawan sikap anti toleransi atau intoleransi yang semakin berkembang. Bhinneka Tunggal Ika dan nilai Pancasila dijadikan dasar dalam upaya membina kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kata Kunci: *Intoleransi; Pancasila; Organisasi Keagamaan; Ketahanan Ideologi*

PENGANTAR

Pancasila merupakan dasar negara bagi negara Indonesia serta sebuah pedoman hidup bernegara yang sangat mendasar bagi bangsa Indonesia. Pancasila merupakan sebuah dasar bagi setiap pelaksanaan berbangsa bernegara dan bermasyarakat di Indonesia. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari merupakan sebuah hal yang sangat penting untuk dilakukan oleh setiap warga negara Indonesia. Warga negara yang baik (*good citizen*) merupakan sebuah tujuan dari pelaksanaan dan penerapan Pancasila. Warga negara yang baik yaitu warga negara yang baik secara pengetahuan, karakter, maupun tindakan misalnya mengerti akan hak dan kewajiban, menghargai perbedaan, ikut berpartisipasi aktif dalam ruang lingkup berbangsa bernegara dan bermasyarakat. Proses pembentukan warga negara yang baik tentu bukan suatu hal yang mudah, banyak proses maupun tahapan yang dilalui. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang multikultural memiliki keragaman dari setiap segi kehidupan beragam suku, agama, ras, golongan, budaya, adat istiadat dan lainnya menjadi sebuah peradaban yang harus dijaga dengan baik. Pancasila tidak terlahir secara mendadak, melainkan melalui proses

yang sangat panjang selaras dengan sejarah panjang lahirnya bangsa Indonesia karena pada dasarnya Pancasila lahir dari kebiasaan maupun karakter bangsa Indonesia sendiri.

Para pendiri bangsa (*Founding father*) menempatkan sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai konsep yang paling mendasar. Maka sila Pancasila dari sila pertama berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa, hal itu dilakukan karena para pendiri bangsa mengetahui bahwa persoalan agama sangat sensitif dan akan menjadi suatu masalah di masa yang akan datang apabila tidak dilaksanakan secara baik. Alasan seperti itulah yang membuat Sila pertama membahas tentang persoalan agama, sebegitu pentingnya sehingga persoalan agama ditempatkan pada sila pertama dalam Pancasila. Hal tersebut dikarenakan sejarah bangsa Indonesia selalu identik dengan kerajaan bercorak agama, kemudian masa interaksi dengan Bangsa Eropa dan Timur Asing yang membawa agama Kristen, Katolik, dan Kong Hu Cu. Bahkan, masa pra sejarah Bangsa Indonesia pun telah memiliki sebuah kepercayaan animisme dan dinamisme, artinya bangsa Indonesia diajarkan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai relegius dan percaya terhadap keberadaan

Tuhan (Setialaksana, dkk., 2019: 7). Hingga saat ini ada enam agama yang diakui secara peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Keenam agama tersebut pada dasarnya semua mengajarkan nilai-nilai kebaikan yang sesuai dengan penerapan dan pandangan Pancasila.

Pada prinsipnya Pancasila merangkul semua umat beragama semua golongan tanpa terkecuali. Dalam berbagai peristiwa dan catatan sejarah, Soekarno berkali-kali mengemukakan bahwa Pancasila merupakan konsepsi ideal yang merangkul seluruh lapisan masyarakat, golongan, ras, dan agama menuju persatuan Indonesia yang mapan (Adiwilagara, 2017:135). Namun pada kenyataannya kerap ada isu-isu intoleransi, seperti suatu sikap maupun tindakan intoleransi terhadap umat beragama. Padahal secara histori Pancasila adalah suatu hal yang final, perdebatan penentuan ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila telah dirumuskan dan diperdebatkan di era Soekarno bahkan sebelum Indonesia merdeka, dan disetujui oleh seluruh pihak, seluruh agama, seluruh golongan dan lain sebagainya. Artinya bahwa seluruh pihak telah menyetujui dan bersepakat bahwa dasar dari negara Indonesia yaitu Pancasila. Adanya upaya mendesak agama ke level negara sebagai dasar perjuangan Islamisme, dalam beberapa konteks tidaklah perlu menjadi perdebatan mengingat nilai-nilai agama, khususnya Islam telah tersublimasi bahkan sejak Pancasila lahir sebagai sebuah ideologi maupun konsep yang mapan (Adiwilaga, 2017: 141).

Negara Indonesia memiliki struktur kewilayahan yang beraneka ragam, baragam suku, agama maupun ras. Mengingat hal itu maka negara Indonesia memiliki potensi yang cukup tinggi akan terjadinya sikap intoleran,

terutama intoleran terhadap suku dan agama. Apabila warga negaranya belum terlalu mengerti dan paham akan toleransi, toleransi akan umat beragama, toleransi akan perbedaan suku, toleransi akan perbedaan bahasa dan lain sebagainya. Warga negara Indonesia harus dapat beradaptasi akan hal itu, menciptakan warga negara yang toleran terhadap perbedaan merupakan suatu misi dalam menciptakan warga negara yang baik (*good citizen*). Intoleran ini dapat menunjukkan dirinya secara eksplisit maupun implisit, baik dalam bentuk individu maupun kolektif. Pada kebanyakan kasus yang ditemui di Indonesia, intoleran paling banyak menampakkan pada bentuk kolektif dengan mengatasnamakan kelompok agama tertentu (*identity politics*). Dengan kekuatan massa yang dimiliki, kelompok ini menjadi sebuah kekuatan tersendiri yang patut diperhitungkan. Kecenderungan masyarakat Indonesia mengikuti kelompok terbanyak mengakibatkan benturan tersebut terjadi, dimana Pancasila yang merupakan sesuatu hal yang sudah final mulai diragukan dan diperdebatkan. Tentu hal tersebut akan memicu perpecahan, terutama perihal perpecahan agama. Maka penguatan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan lingkungan masyarakat kini merupakan suatu keniscayaan yang wajib hukumnya untuk diterapkan. Berbagai polemik perbuatan yang menyimpang dari penerapan Pancasila sebagai nilai dasar negara Indonesia. Perlu penguatan Pancasila dan pemahaman akan ketahanan nasional kepada warga negara khususnya pada generasi muda sebagai generasi penerus bangsa.

Konsepsi mengenai ketahanan nasional, pada realita sekarang ini banyak berbagai macam organisasi keagamaan yang ada sebenarnya merupakan suatu potensi yang bersifat dalam membangun kehidupan

berbangsa dan bernegara karena merupakan salah satu basis massa yang memiliki kekuatan nyata. Konsekuensinya, potensi positif ini harus ditemukan dan kemudian diberdayakan agar organisasi keagamaan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat. Hal ini mutlak dilakukan karena kelompok-kelompok semacam ini rawan ditunggangi kepentingan politik atau ekonomi pihak-pihak tertentu. Dengan maraknya berbagai macam organisasi keagamaan yang ada tentu memiliki dampak positif maupun negatif. Maka perlu ada pengawasan dari pemerintah sehingga kelompok-kelompok organisasi keagamaan tersebut tidak menyimpang dari nilai-nilai Pancasila atas dasar kebebasan beragama.

Analisis dari potensi maupun ancaman intoleransi, maka diperlukan adanya suatu regulasi dan penguatan nilai-nilai Pancasila dan pemahaman akan ketahanan nasional dengan memahami kembali hakikat keberadaan organisasi keagamaan dan konstruksi berpikir organisasi keagamaan terkait dengan ancaman intoleransi dengan menggunakan berbagai pendekatan atau persepsi. Langkah berikutnya diperlukan adanya kebijakan dalam menangani ancaman tersebut dengan memperhatikan berbagai pendekatan maupun perspektif. Kebijakan terhadap ancaman intoleransi merupakan langkah awal bagi penataan kelompok-kelompok massa yang mendasarkan atas agama agar tidak berlanjut pada gerakan terorisme yang membahayakan persatuan dan kesatuan NKRI.

Berdasarkan pengantar yang telah diutarakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana menyikapi dan strategi dalam upaya pencegahan sikap intoleransi di lingkungan masyarakat

berbangsa dan bernegara khususnya di wilayah Tasikmalaya

Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kasus yang menggali suatu fenomena atau kasus secara terperinci dan mendalam pada waktu dan kegiatan (program, proses, institusi atau kelompok sosial) dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data untuk menggambarkan respon dari suatu peristiwa pada periode tertentu (Cresswell, 2016). Argumentasi menggunakan metode studi kasus karena penelitian ini hanya fokus pada pemicu munculnya sikap intoleran yang berdampak pada munculnya diskriminasi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kaum minoritas yang dalam hal ini adalah kelompok Nasrani yang berkaitan dengan SARA (suku, ras, agama, dan antargolongan), serta praktik intoleran yang diakibatkan oleh konstruksi nilai moral yang menyimpang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi secara langsung tentang praktik intoleran yang diakibatkan oleh konstruksi nilai moral. Metode observasi dilakukan dengan mengadakan pengamatan, pengindraan dan pencatatan dengan sistematis terhadap fenomena yang diselidiki. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara dengan teknik wawancara mendalam (*in depth interview*), studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Sedangkan untuk teknik analisis data pada penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data, dan mengambil kesimpulan.

PEMBAHASAN

Permasalahan mengenai ketahanan ideologi Pancasila saat ini sedang membelenggu dan menjadi polemik bangsa Indonesia. Hal tersebut terlihat dari munculnya berbagai isu gerakan pembentukan negara berbasis agama sampai dengan praktik-praktik pemahaman dan perubahan ideologi di berbagai aspek kehidupan. Permasalahan akan ideologi memiliki dampak yang luar biasa besar terutama dalam lingkup bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Ketika ideologi suatu negara tidak dipahami dan dimengerti oleh warga negaranya, maka negara tersebut tidak memiliki kekuatan untuk menguasai negaranya serta seluruh aspek kehidupan suatu bangsa akan bermasalah. Karena pada dasarnya ideologi Pancasila adalah penentu arah perjalanan suatu bangsa (Maharani, dkk., 2019: 278). Pancasila merupakan dasar bagi bangsa Indonesia. Segala ketentuan yang berlaku berdasar pada Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Jika potensi meruntuhkan dan mengubah ideologi Pancasila diketahui sejak dini, banyak hal yang menyebabkan kehancuran bangsa dan negara Indonesia dapat dikelola dengan baik. Ideologi Indonesia merupakan suatu hal yang mutlak dan tidak dapat diubah. Ada dua hal yang tidak dapat diubah di Indonesia yaitu Pancasila sebagai Ideologi Indonesia dan Pembukaan UUD 1945 sebagai konstitusi bangsa Indonesia. Indonesia sangat membutuhkan alat semacam ini saat perang *proxy* berkecamuk di dunia. Pancasila dirumuskan dalam rangka mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Kepribadian yang cinta merdeka itu membuat bangsa Indonesia ingin bersahabat dengan semua manusia, semua bangsa, dan semua negara di dunia ini. Jadi, spirit Pancasila adalah cinta merdeka yang mewujudkan dalam

perikemanusiaan. Untuk itu implementasi Pancasila dalam praksis mestilah menjadi spiritualitas kehidupan bangsa Indonesia yang implikasinya memerdekakan manusia sebagai manusia. Ideologi Pancasila pada hakikatnya terbentuk dari pandangan hidup bangsa Indonesia dengan diangkatnya nilai-nilai adat istiadat, nilai-nilai kebudayaan, dan nilai-nilai religius yang ada dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk suatu negara, bukan terbentuk dari pemikiran atau perenungan dari seseorang atau suatu kelompok saja (Karsayuda dan Tektona, 2021: 113).

Banyak faktor yang menyebabkan tindakan kekerasan atau sikap intoleran terhadap umat beragama salah satunya adalah pemahaman agama yang bersifat ekstrinsik atau menggunakan agama sebagai alat mencapai tujuan yang bukan tujuan agama itu sendiri, melainkan kepentingan pribadi atau menggunakan agama untuk mencapai kedudukan sosial dan kekuasaan. Tidak hanya itu pemahaman terhadap kebhinekaan yang terangkai dalam nilai-nilai Pancasila yang mengalami kemunduran. Untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai Pancasila, diperlukan pemahaman nilai-nilai tersebut melalui pendidikan dari tingkat pendidikan dasar hingga pada tingkat pendidikan tinggi.

Dalam bahasa Latin toleransi yaitu *tolerantia*, berarti kelonggaran kelembutan hati, keringanan dan kesabaran. Secara umum istilah toleransi mengacu pada sikap terbuka, lapang dada, suka rela dan kelembutan. Terdapat dua penafsiran dalam memaknai toleransi penafsiran bersifat negatif yang menyatakan bahwa toleransi itu cukup mensyaratkan adanya sikap membiarkan dan tidak menyakiti orang lain atau kelompok, penafsiran bersifat positif yaitu dengan mengatakan bahwa

toleransi tidak hanya sekedar membiarkan melainkan adanya dukungan keberadaan orang lain atau kelompok. Dalam toleransi terdapat beberapa butir refleksi kedamaian adalah tujuan, toleransi adalah metodenya. Toleransi menghargai individu dan perbedaan, menghapus keegoan dan ketegangan yang disebabkan ketidakpedulian. Menyediakan kesempatan untuk menemukan dan menghapus stigma yang disebabkan kebangsaan, agama dan apa yang diwariskan melalui pengertian dan keterbukaan orang yang toleran memperlakukan orang lain secara berbeda, dan menunjukkan toleransi. Kebalikan dari nilai-nilai toleran adalah intoleran yang dapat diartikan secara sederhana tidak menghargai perbedaan antara sesama baik dari sisi agama, etnis ataupun yang lainnya sehingga dapat menimbulkan kebencian bahkan kekacauan. Jika sikap intoleran terus terjadi tanpa ada upaya kesadaran diri, dapat berakibat konflik sosial yang mengarah pada proses disintegrasikan bangsa. Banyak faktor yang dapat menimbulkan sikap dan perilaku intoleran, akan tetapi agama bukan merupakan sumber dari penyebab intoleran itu sendiri melainkan pemahaman yang bersifat intrinsik terhadap ajaran agama itu sendiri. Sikap eksklusifisme yang berlebihan menimbulkan gerakan-gerakan yang mengarah kepada perbuatan intoleran (Amir dan Hakim, 2018).

Berdasarkan hal tersebut, maka Pancasila menjadi sebuah alat pemersatu bangsa Indonesia agar tidak terpecah belah, namun di era sekarang ini banyak menjumpai sikap intoleran di lingkungan masyarakat maupun di dunia maya seperti di media sosial dan lain sebagainya, yang hal tersebut bertentangan dengan nilai dari Pancasila dan tidak mencirikan sebagai warga negara yang baik. Secara historis, tindakan radikal

yang diprakarsai arus militan dari Islamisme sendiri mulai muncul di Indonesia pasca berdirinya Negara Islam Indonesia (NII) yang diproklamasikan langsung oleh S.M. Kartosoewirdjo di Desa Ciawiligar Kabupaten Tasikmalaya. Hal itu dianggap sebagai cikal bakal arus militan Islamisme Indonesia, karena di peristiwa tersebut pertama kali muncul wacana NII sendiri yang memiliki basis di Jawa Barat, khususnya di pegunungan-pegunungan di Kabupaten Bandung bagian selatan, Kabupaten Tasikmalaya, dan juga tersebar di Kabupaten Garut. Bahkan disinyalir, hingga detik ini, sisa-sisa perjuangan NII yang sudah ditumpas pada masa Orde Lama masih berkembang secara senyap. Dikhawatirkan, gerakan-gerakan senyap tersebut kembali menimbulkan teror dan menyebarkan kegiatannya ke seluruh wilayah Indonesia, munculnya reaksi-reaksi kelompok masyarakat seperti itu tentu akan menyebabkan perpecahan dan perlu untuk diwaspadai karena akan berdampak besar seperti perpecahan antar umat beragama, intimidasi, bahkan kekerasan atau bentrok antar kelompok. Agar peristiwa-peristiwa tersebut tidak terjadi maka solusi yang diberikan yaitu pemahaman dan sosialisasi terutama pada generasi muda sebagai generasi penerus bangsa agar tidak berdampak lebih jauh. Dengan penanaman nilai Pancasila sejak dini yang terus menerus, intensif, masif, terkoordinasi dan terintegrasi dengan baik, akan membuat paham dan gerakan radikal menjadi mati dan tidak berkembang. Gerakan radikal mati karena sudah tidak ada lagi orang yang mau terlibat dan berjuang bersamanya. Mereka tidak mau dibodohi dengan ideologi maut yang membuat mereka mati sia sia. Dengan matinya gerakan dan ideologi radikal, maka akan berdampak terhadap suasana kehidupan sosial masyarakat

yang lebih tenang, damai, aman dan tanpa ada rasa ketakutan. Suasana ini akan berdampak terhadap ketahanan ideologi Pancasila karena ajaran Pancasila semakin bisa dipercaya dan dirasakan kebenarannya.

Pemahaman akan Pancasila dan ketahanan ideologi Pancasila menjadi sebuah solusi agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi dan pada akhirnya akan berdampak terhadap ketahanan nasional bangsa Indonesia. Oleh sebab itu perlu sebuah kebijakan yang komprehensif dan terpadu dalam penanaman nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 sehingga hasilnya bisa lebih optimal. Kebijakan tersebut harus didukung oleh dengan langkah-langkah strategis dan upaya upaya teknis untuk melaksanakan strategi tersebut pada tingkat operasional. Dengan kebijakan, strategi dan upaya yang lebih kongkrit, pemerintah dan jajarannya bersama masyarakat dapat bersinergi melakukan penanaman Nilai-Nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 sebagai bagian deradikalisasi dalam menghadapi radikalisme dan terorisme.

Bentuk Ancaman Intoleransi

Pada dasarnya isu intoleransi banyak terjadi apalagi dengan pengaruh pesatnya perkembangan zaman dan pesatnya perkembangan teknologi memiliki pengaruh positif maupun negatif di setiap sektor maupun segi kehidupan, dengan kemudahan akses yang diberikan setiap orang saat ini memiliki peluang sama dalam menerima informasi, namun di sisi lain dengan kemudahan akses yang diberikan memberikan peluang polemik yang baru yaitu pemberitaan informasi palsu, maka dari itu setiap warga negara harus diberikan pemahaman akan menyeleksi serta memfilter setiap informasi maupun berita yang diterima dengan memeriksa

kebenaran setiap informasi yang diperolehnya. Dengan begitu maka akan menekan setiap informasi palsu yang beredar di masyarakat, karena berdasarkan realita yang terjadi, banyak tindakan-tindakan intoleran didasari penerimaan informasi palsu atau gagal paham akan sebuah informasi.

Masalah pemahaman keagamaan ini merupakan produk lama yang senantiasa direproduksi oleh para pemberi ‘mandat terror’ dan para ‘mandat intoleransi’ bahwa agama mengajarkan untuk jihad dengan fisik yakni mati sebagai martir atau mati di sebuah ujung pedang, mati di sebuah granat atau bom molotov. Semuanya dianggap sebagai jihad yang sesungguhnya maka tak segan anak-anak muda yang masih kurang paham agamanya segera melaksanakan. Hal itulah yang perlu mendapatkan perhatian oleh para pengelola negara dan pendakwah agama. Para pengelola negara dan pendakwah agama perlu merevisi kembali pemahamannya tentang doktrin jihad, doktrin iman, doktrin takwa bahkan doktrin surga dan neraka sehingga memberikan kerangka yang relatif utuh pada kaum muda harapan bangsa. Agamawan harus mendorong sikap dan tindakan toleran antar umat beragama yang sekarang tampak semakin hampa. Sikap toleran itu sendiri merupakan kesediaan untuk menerima adanya perbedaan teologi, perbedaan keyakinan, menghargai, menghormati yang berbeda sebagai sesuatu yang nyata adanya dan diyakini oleh mereka yang memang berbeda. Dengan sikap toleran inilah akan lahir sikap hidup rukun dalam perbedaan, tidak saling menghujat, membenci, mengkafirkan apalagi hendak membunuhnya karena berbeda satu dengan yang lain (Qodir, 2016).

Keberagaman ini tidak hanya terbatas pada budaya dan suku, tetapi juga agama.

Dalam beberapa kasus maupun isu yang terjadi mengenai sikap intoleransi umat beragama berdampak ketidakselerasan serta pertikaian antar umat agama yang mengakibatkan perpecahan dan persetuan antar umat beragama sehingga antar umat beragama tidak rukun dan harmonis. Semua itu terangkum dalam Pancasila dan nilai kebhinekaan. Tentang keberagaman umat beragama toleransi antar umat beragama adalah modal sosial, kunci keberhasilan Indonesia dan harus dijaga untuk menjaga keutuhan Indonesia. Seiring perkembangan zaman, arus informasi dan teknologi begitu pesat sehingga berdampak pada perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat, termasuk dalam pemahaman ajaran agama. Kemajuan teknologi dan informasi yang tidak dapat menutupi fenomena berdampak buruk seperti masalah SARA, berita bohong (*hoax*), gerakan radikal, pelanggaran kebebasan beragama.

Serangkaian survei menegaskan bahwa tingkat kerentanan terhadap intoleransi di Indonesia telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan selama tiga tahun terakhir. Jajak pendapat tersebut telah menarik perhatian publik pada insiden penistaan agama pada akhir 2016 yang memicu gelombang protes besar-besaran oleh Aksi Bela Islam (ABI). Namun, beberapa pakar dan analis media berpendapat bahwa penodaan dipolitisasi oleh kelompok tertentu. Asumsi politik ini kemudian ditentang oleh gerakan ABI yang diklaim mengemban misi politik aliran dan mengusung radikalisme agama. Pembahasan kasus-kasus intoleransi dan penyederhanaan secara simultan klaim ekstremisme agama terhadap kelompok tertentu menunjukkan betapa kompleksnya situasi keagamaan di Indonesia (Farid, 2018; Irawan dan Firdaus, 2021).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, toleransi berasal dari kata '*tolerantia*' yang bersifat atau bersikap menengang (menghargai, membiarkan, membolehkan), pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan dan sebagainya) yang berbeda dan atau yang bertentangan dengan pendiriannya. Toleransi di sini bukan hanya dari aspek keagamaan saja, melainkan sangat luas, baik dari segi sosial, ekonomi, budaya, suku, ras dan kehidupan bermasyarakat pada umumnya. Jika ditarik kebelakang, pada hakikatnya bahwa Indonesia sudah sangat menyadari risiko yang akan muncul dari adanya keberagaman ini. Bahkan bisa dikatakan semangat juang untuk meredeka lahir karena adanya perbedaan. Maka, dari itu atas kesadaran tersebut bahwasanya Indonesia sudah memiliki alat agar keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia akan tetap terjaga sampai kapan pun yakni melalui Pancasila.

Pancasila adalah ideologi dan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang termaktub dalam alenia keempat pembukaan UUD 1945. Pancasila memiliki nilai yang digali dari Indonesia, artinya digali dan diambil dari kekayaan, rohani, moral dan budaya masyarakat dan bangsa Indonesia. Di sini Pancasila dikenal sebagai ideologi terbuka dalam arti bahwa Pancasila sebagai ideologi yang mampu mengikuti perkembangan jaman serta dinamis, merupakan sistem pemikiran terbuka dan merupakan hasil konsensus masyarakat itu sendiri, sehingga Pancasila juga merupakan dasar negara yang sudah barang tentu harus terwujud dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila hadir diharapkan menjadi suatu dasar atau landasan dalam berkehidupan dan menjawab segala tantangan apalagi di era sekarang seperti saat ini.

Dari hasil penelitian gambaran dari bentuk ancaman intoleransi di Kabupaten

Tasikmalaya ini hasil dari pemetaan bahwa ada beberapa ormas atau kelompok keagamaan yang cenderung pemikiran dan tindakannya radikal. Selanjutnya menurut data bahwa Kabupaten Tasikmalaya sudah mengalami kasus intoleransi baik peristiwa basis Darul Islam maupun Rusuh Tasikmalaya. Hal ini menjadi indikator bahwa sebagai gambaran bentuk ancaman intoleransi organisasi kemasyarakatan terhadap dasar negara Pancasila, dan menjadi sorotan terkait konservatisme Islam dan intoleransi keagamaan adalah Tasikmalaya. Terkenal sebagai basis DI dan Masyumi pada masa lalu, Tasikmalaya adalah sebuah daerah di Jawa Barat yang belakangan populer karena adanya pemberlakuan 'Perda Syariah' dan kehadiran organisasi-organisasi Islam radikal (Mudzakir, 2017:58). Kelompok minoritas dalam Islam sendiri, khususnya dalam hal ini adalah Ahmadiyah dan Syiah tidak hanya mengikuti fatwa dan keputusan di tingkat yang lebih atas. Kedua kelompok tersebut dipermasalahkan karena dinilai mengganggu arus besar di dalam. Implikasi dari perkembangan ini mengena langsung pada keberadaan. Berbagai studi telah mengemukakan pendapatnya mengenai Syiah dan Ahmadiyah. Kajian-kajian ini pada umumnya berfokus pada kronologi kekerasan dan perbedaan penafsiran alkitabiah, tetapi tidak melangkah lebih jauh ke dimensi resiliensi yang diteliti. Sosial. Pamungkas (2018) menyatakan bahwa tindakan kekerasan terhadap Ahmadiyah dan penganiayaan yang mereka alami memperkuat keyakinan teologis mereka bahwa ajaran mereka adalah benar. Tekanan dipahami sebagai upaya pencerahan.

Maharani dkk (2019: 279) mengemukakan bahwa ancaman terhadap ideologi tersebut dikemas melalui berbagai

macam isu yang sering tidak disadar oleh suatu bangsa. Misalnya isu-isu demokratisasi, HAM, dan kelestarian lingkungan hidup di negara-negara berkembang. Salah satunya adalah tuntutan kelestarian hutan tropis di Indonesia. Sementara itu, negara-negara berkembang pada umumnya masih harus berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya sendiri. Seperti halnya Indonesia yang masih sering dilanda konflik disintegrasi, serta adanya oknum-oknum yang tidak atau kurang memahami wawasan nusantara dan ketahanan nasional. Kondisi dan situasi tersebut merupakan salah satu indikator melemahnya pemahaman masyarakat akan Pancasila dan kurangnya memiliki pengetahuan tentang wawasan nusantara dan ketahanan nasional. Sedangkan setiap warga Indonesia sepatutnya paham akan wawasan nusantara dan ketahanan nasional bangsa Indonesia agar masyarakat memiliki rasa cinta tanah air dan memiliki rasa nasionalisme.

Ketidaksesuaian Intoleransi Dengan Pancasila Dan Ketahanan Nasional

Serangkaian aksi teror dan tindak kekerasan oleh sekelompok organisasi Islam yang terjadi kurang lebih satu dasawarsa terakhir telah menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang mendapatkan 'lampu merah' dunia internasional. Di kawasan Asia, Indonesia menjadi salah satu wilayah penting dalam studi terorisme dan radikalisme keagamaan. Merujuk kepada Global Terrorism Database (2007), dari total 421 tindak terorisme di Indonesia yang tercatat sejak 1970 hingga 2007, lebih 90% tindak terorisme terjadi pada kurun tahun-tahun mendekati Soeharto lengser hingga memasuki era demokrasi (Mubarak, 2015: 79). Dari hasil penelitian gambaran potensi gerakan radikalisme pada organisasi

kemasyarakatan di Kabupaten Tasikmalaya adalah bahwa salah satunya menyinggung hal-hal yang bersifat agama. Tasikmalaya pernah mengirimkan masyarakat yang lumayan besar dari aksi 411 dan 212, maka hal tersebut juga dapat menimbulkan dan meningkatkan potensi gerakan radikalisme yang mengganggu dasar negara Pancasila.

Di dunia pendidikan, baru-baru ini mendapat perhatian publik yang cukup luas karena adanya fenomena permasalahan intoleransi problematika yang muncul di dunia pendidikan dewasa ini semakin kompleks dengan berbagai implikasinya. Sebenarnya, masalah-masalah yang muncul dapat dikatakan sebagai problematika yang klasik atau klise, karena hal-hal yang dianggap sebagai masalah itu pada prinsipnya bukan hal yang baru, akan tetapi di era digital saat ini, dampak dari masalah tersebut lebih luas karena viral melalui media massa maupun media sosial. Di dunia pendidikan, baru-baru ini mendapat perhatian publik yang cukup luas karena adanya fenomena permasalahan intoleransi (Rusnaini, dkk, 2021:230).

Saat ini Pancasila yang merupakan ideologi Negara Indonesia telah digoyahkan dengan berbagai tantangan baik dari luar maupun dalam. Hal ini ditunjukkan dari sebuah data yang dikeluarkan oleh Lembaga Ketahanan Nasional melalui surveinya yang dilakukan oleh Indeks Ketahanan Nasional Indonesia (IKN) telah mengalami penurunan tahun 2014-2015 pada gatra ideologi (Rukmana, dkk., 2020:186). Hal tersebut membuktikan bahwa ada penurunan atau melemahnya Pancasila di lingkungan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Maka perlu adanya upaya untuk mencegah hal tersebut yaitu dengan cara penerapan Pancasila di kehidupan sehari-hari, mensosialisasikan

akan nilai-nilai Pancasila serta membuat sebuah kebijakan maupun kegiatan yang akan berdampak pada aktualisasi Pancasila di masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tentu dalam penerapannya akan menemui sebuah kendala maupun ketidaksesuaian. Namun penanaman nilai Pancasila menjadi sebuah urgensi di era sekarang ini terutama pada generasi muda yang nantinya akan menjadi penerus bangsa. Pada prinsipnya ketahanan wilayah tidak dapat dipisahkan dari konsep ketahanan nasional. Kriteria ketahanan lokal berkaitan dengan konsep yang merupakan prinsip atau aspek proses pengelolaan yang bertujuan untuk mencapai ketahanan lokal. Aspek yang dimaksud adalah Astagatra yang terdiri dari Kelompok Gatra Alam yang meliputi geografi, kekayaan alam, dan kependudukan, dan Kelompok Gatra Sosial yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan.

Berangkat dari landasan teori penelitian ini bahwa ketahanan wilayah merupakan bentuk mikro dari ketahanan nasional, dimana setiap dimensi ketahanan wilayah akan berdampak pada ketahanan nasional. Pada era otonomi daerah konsep ketahanan nasional harus dibangun dari wilayah-wilayah yang ada di seluruh Indonesia, artinya ketika setiap daerah di Indonesia memiliki ketahanan wilayah yang tangguh, maka secara otomatis ketangguhan ketahanan nasional dapat terwujud. Mewujudkan ketahanan wilayah yang tangguh diperlukan suatu pembinaan yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Hal tersebut harus dilakukan oleh seluruh komponen yang ada di suatu wilayah, baik pemerintah, organisasi kemasyarakatan maupun masyarakat umum. Sudah tidak selayaknya dalam upaya pencapaian ketahanan

wilayah hanya dibebankan kepada pemerintah daerah saja. Peran serta masyarakat khususnya pemuda secara langsung juga sangat diperlukan untuk mengoptimalkan proses perwujudan ketahanan wilayah. Partisipasi pemuda dalam bela negara menghasilkan pemahaman, kesadaran, dan komitmen terhadap bela negara. Dari pemahaman, kesadaran, dan komitmen terhadap bela negara tersebut kemudian memberikan pengaruh terhadap ketahanan wilayah (Febrihananto, dkk 2017).

Ketahanan wilayah merupakan bentuk suatu stabilitas yang bisa tercapai jika setiap elemen baik pemerintah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan bisa berjalan secara berdampingan, saling mendukung dan mengawasi satu sama lain. Kondisi tersebut yang nantinya akan menghasilkan suatu kekuatan yang luar biasa untuk meningkatkan kemampuan wilayah dalam mewujudkan ketahanan wilayah, sehingga suatu wilayah mampu untuk mewujudkan kesejahteraan, keseimbangan, serta keserasian dalam setiap sendi kehidupan yang sesuai dengan amanah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 (Alfaqi, dkk., 2017).

Strategi Pencegahan Ancaman Intoleransi Dengan Penerapan Nilai Pancasila Sebagai Implikasi Ketahanan Ideologi

Indonesia merupakan negara multicultural terdiri dari berbagai kebudayaan, agama, adat istiadat yang beragam. Arifin, dkk., (2022) menegaskan bahwa masyarakat yang beragam dapat berpotensi menimbulkan konflik apabila setiap individu dengan tujuan yang berbeda satu sama lain tidak memahami konsep toleransi untuk menghargai adanya perbedaan tersebut. Konsep perbedaan telah dirumuskan jauh sebelum negara Indonesia lahir yang ditulis dalam Kitab

Sutasoma karya Mpu Tantular sebagai salah satu kaum intelektual pada zaman kerajaan Majapahit. Diciptakan oleh ulama besar dalam tulisan-tulisan Sutasoma, konsep *vinneka* atau perbedaan kemudian diadopsi oleh para founding fathers negara pada masa kemerdekaan bangsa Indonesia.

Indonesia memiliki ciri khas atau identitas nasional sebagai negara multikultural yang kehidupannya dengan mengedepankan sikap toleransi. Suatu bentuk yang membedakan antara negara Indonesia dengan negara lain. Toleransi menjadi kunci utama di Indonesia dalam kehidupan berbangsa maupun bernegara, mengingat masyarakat Indonesia sangat majemuk sehingga keharmonisan kehidupan di Indonesia dapat terjaga dan terawat dengan baik. Persatuan di masyarakat Indonesia yang beragam adalah cita-cita para pahlawan dan juga masyarakat Indonesia, sehingga setiap masyarakat harus mampu mendidik anak keturunannya untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dengan mengedepankan sikap toleransi (Shofa, 2022). Sikap toleransi harus dijaga untuk memerangi tumbuhnya intoleransi. Semboyan *Bhineka Tunggal Ika* digunakan sebagai dasar upaya memajukan kerukunan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagaimana tertuang dalam Garuda Pancasila sebagai lambang negara. Intoleransi muncul karena pluralisme yang disebabkan oleh faktor teologis seperti keyakinan yang sangat kuat terhadap individualitas setiap warga negara. Agama diyakini sebagai kebenaran tertinggi, jadi apa pun di luar keyakinan itu salah. Hobolt dkk (2011) mengemukakan bahwa agama dan tokoh agama memiliki peran penting dalam membentuk sikap toleransi dalam umat beragama, tokoh di setiap agama sepatutnya memberikan contoh bagaimana bersikap

terhadap agama lain agar tidak mengarah pada tindakan intoleran dan skeptisisme. Kaum muslim memiliki dasar yang kuat bahwa tidak ada agama yang benar atau tidak ada keyakinan yang benar kecuali Islam. Agama Katolik juga memiliki keyakinan yang sama yaitu tidak ada kebenaran di luar Katolik. Dasar teologis ini kemudian menjadi keyakinan yang kuat sebagai dalam bersikap khususnya dalam kehidupan bernegara. Hal ini selanjutnya melahirkan suatu pemikiran relativisme di kalangan agamawan yaitu paham yang menghargai pendapat dan kebenaran orang lain atau yang biasa dikenal dengan istilah toleransi.

Menurut Febrihananto, dkk (2017: 69), pada konteks Indonesia, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan pun ikut mengalami pergeseran. Ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia bukan lagi dalam bentuk agresi militer akan tetapi berupa penjajahan ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya. Di sinilah globalisasi memegang peranan sebagai pembawa arus ancaman tersebut dari luar menuju ke Indonesia. Dalam hal ini fenomena yang terjadi di Tasikmalaya sebagian kelompok masyarakat sudah dimasuki oleh paham-paham yang berdampak pada ancaman intoleransi yang berimplikasi kepada ketahanan ideologi. Pancasila merupakan landasan idiil dalam mengatasi persoalan radikalisme dan terorisme. Gerakan radikalisme dan terorisme secara khusus bertentangan dengan tiga sila utama dalam pancasila yaitu sila Ketuhanan Yang Maha Esa, sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dan sila Persatuan Indonesia.

Hakikat ketahanan nasional Indonesia adalah keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk dapat menjamin

kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasional. Hakikat konsepsi ketahanan nasional Indonesia adalah pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan secara seimbang, serasi, dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan nasional. Keberhasilan implementasi nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam menghadapi gerakan radikalisme dan terorisme, akan mampu memperkuat ketahanan nasional. Pancasila dan UUD NRI 1945 yang diyakini kebenarannya, dihayati dan diamalkan oleh warga negara Indonesia dalam perilaku kehidupan sosial sehari-hari, bisa menjadi kekuatan efektif untuk menolak dan menangkal potensi munculnya benih radikalisme dan terorisme.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa sikap bela negara pemuda di Indonesia semakin luntur, yang langsung maupun tidak langsung pada akhirnya dapat berpengaruh pada tingkat ketahanan nasional. Pudarnya sikap bela negara secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi kehidupan masyarakat di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Untuk menumbuhkan sikap bela negara kepada para pemuda di Indonesia, maka diperlukan wadah atau organisasi kepemudaan yang selalu berusaha untuk menanamkan nilai-nilai bela negara dan nasionalisme. Melalui wadah tersebut, maka ketahanan wilayah yang tangguh di setiap daerah dapat terwujud. Sebuah organisasi akan terus eksis dan berkembang ketika para anggotanya memiliki kesadaran terhadap peran yang dimilikinya. Kesadaran dan eksistensi suatu organisasi memiliki hubungan yang erat. Begitu pula dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Warga negara yang memiliki kesadaran terhadap bela negara akan membuat

negara memiliki ketahanan nasional yang kuat. Kesadaran muncul setelah seseorang memiliki pemahaman terhadap sesuatu. Setelah memahami nilai-nilai yang ada di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maka berikutnya akan muncul kesadaran di dalam diri setiap orang (Febrihananto, dkk, 2017). Kekuatan ideologi Pancasila dan UUD NRI 1945 sebagai landasan idiil dan konstitusional, diharapkan bisa mencegah masuknya paham paham radikal dan aksi terorisme yang akan merusak persatuan dan kesatuan bangsa (Siagian, 2020).

Pada pembukaan UUD 1945 alinea ketiga: “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya.” Makna pembukaan UUD 1945 alinea ketiga: (1). Motivasi spiritual yang luhur bahwa kemerdekaan Indonesia adalah berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa. (2). Keinginan yang didambakan oleh segenap bangsa Indonesia terhadap suatu kehidupan yang berkesinambungan antara kehidupan material dan spiritual, dan kehidupan di dunia maupun akhirat. (3). Adanya pengukuhan pernyataan proklamasi. Maka pada alinea pertama dan ketiga ingin menepis masalah intoleransi yang seringkali menggambarkan secara implisit tentang makna penjajahan yang diperangi melalui konsep hidup keberagamaan yang berbeda (menganggap agamanya yang paling benar dan tidak dapat bersikap bertoleransi pada agama yang berbeda), dan dilakukan tanpa melihat dari aturan dan landasan visional UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut

melaksanakan ketertiban dunia (Tanamal dan Siagian 2020). Implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberi dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai, dan sikap. Dalam Oxford Advance Learner’s Dictionary dikemukakan bahwa implementasi adalah *put something into effect*, (penerapan, sesuatu yang memberikan efek atau dampak). Sedangkan nilai nilai Pancasila adalah nilai nilai yang terdapat dalam lima sila Pancasila yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan dan nilai keadilan sosial. Jadi implementasi nilai pancasila adalah sebuah proses penerapan, ide konsep, kebijakan untuk menerapkan atau mengaplikasikan lima nilai Pancasila dalam kehidupan individu, sosial kemasyarakatan dan kebangsaan sehingga tidak akan timbul intoleransi apabila setiap warga negara paham dan mengerti akan Pancasila.

Kasus Intoleransi Umat Beragama

Berdasarkan data yang dilakukan oleh berbagai lembaga sensus, pusat penelitian dan perguruan tinggi, kasus intoleransi semakin meningkat di masyarakat Indonesia. Intoleransi adalah sikap, pandangan atau perilaku yang tidak menerima perbedaan orang lain, kelompok lain atau komunitas lain, dan melihat sesuatu secara berbeda dianggap salah dan ilegal dan diperangi dan dihancurkan. , penolakan orang-orang tertentu untuk terlibat dalam kegiatan keagamaan, kesulitan memberikan sanksi terhadap tempat-tempat ibadah, dan ketidakpercayaan langsung dari mereka yang tidak seagama. , termasuk membenarkan darah mereka yang menganut agama yang sama. Keyakinan mereka tidak dianut dan ditambah dengan adanya peraturan

daerah yang dibuat oleh pemerintah daerah yang cenderung mendiskreditkan orang-orang tertentu, mereka dapat memasukkan politik identitas ke dalam ranah politik untuk keuntungan pribadi atau Intoleransi adalah tangga pertama terorisme, dan intoleransi adalah benih bagi munculnya radikalisme, yang kemudian mengarah pada tindakan terorisme.

Terorisme yang ada di tengah masyarakat berawal dari sikap dan perilaku intoleransi yang kemudian termanifestasikan dalam aksi teror. Aksi terorisme sangat membahayakan kemanusiaan karena tidak sesuai dengan nilai-nilai keadaban, pluralisme, multikulturalisme, dan inklusifisme. Untuk memerangi terorisme, maka diperlukan upaya mendeteksi akar terorisme yang bermula pada sikap intoleransi dan radikalisme. Intoleransi, radikalisme, dan terorisme, merupakan ancaman bagi eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara, dasar negara, dan falsafah negara. Pancasila sengaja berupaya diganti dengan ideologi lain berbasis agama, NKRI ingin diganti menjadi negara khilafah, dan bhineka tunggal ika ingin dirubah menjadi uniformitas, sehingga semua pihak perlu sikap waspada terhadap sekelompok pihak yang mengarah pada kelompok radikal yang berpotensi mengarah pada aksi teror. Sebagai ideologi negara, Pancasila harus diselamatkan oleh semua komponen bangsa. Semua pihak harus bertanggungjawab terhadap eksistensi dan penyelamatan Pancasila, dan bukan hanya menjadi tanggungjawab TNI/Polri semata.

Tantangan yang dihadapi masyarakat multikultural Indonesia adalah munculnya 'pluralisme sempit'. Sikap ini muncul dalam bentuk eksklusivitas dan saling tidak percaya terhadap orang yang berbeda keyakinan. Bentuk eksklusivitas yang sempit dapat berupa makna

literal teks kitab suci, mengabaikan konteks keragaman agama yang ada di masyarakat, tidak terpecahkan. Tidak hanya pendekatan hukum all-in-one ini tidak efektif, tetapi juga dapat memperlebar ketimpangan identitas dan melemahkan ketahanan nasional. Dalam hal ini, penelitian ini merekomendasikan pendidikan multikultural sebagai sarana evolusioner namun sistematis untuk menciptakan sikap menghargai, toleransi terhadap budaya lain, dan memperkuat gagasan kerukunan dalam masyarakat (Febriani, dkk, 2021).

Nilai-nilai Pancasila yang di dalamnya terdapat nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai musyawarah mufakat, dan nilai keadilan, harus diajarkan, dipahami, diketahui, dihayati, dijiwai dan diamalkan oleh semua komponen bangsa, khususnya generasi muda penerus bangsa melalui penyelenggaraan pendidikan tingkat dasar, menengah maupun tinggi. Program dan kegiatan untuk membumikan nilai-nilai Pancasila harus menjadi agenda prioritas pemerintah agar diserap dan dijiwai oleh semua komponen bangsa. Nilai-nilai Pancasila harus mampu menjadi penangkal, penangkis, penindak, dan pemulih terhadap degradasi keimanan dan moralitas sekelompok masyarakat yang berperilaku intoleran, radikal, dan melakukan aksi teror (Subagyo, 2020).

Kasus intoleransi terjadi bukan hanya di Indonesia, tapi memang terjadi di berbagai negara seperti di Amerika Serikat. Sunstein & Nussbaum (2004) mengemukakan bahwa di Amerika Serikat sikap intoleran kerap terjadi di lingkungan masyarakat, terutama sikap intoleran tersebut ditujukan kepada kaum muslim, karena warga negara Amerika Serikat memiliki kecenderungan dan menganggap bahwa muslim itu sama dengan teroris, sehingga menimbulkan perpecahan dan

kebencian antar umat beragama. Pemahaman-pemahaman seperti itulah yang memang harus diubah, jangan melabel agama secara keseluruhan hanya karena beberapa kelompok yang menyimpang, karena pada faktanya hanya sebagian kecil muslim yang terbujuk untuk melakukan tindakan terorisme. Islam mengajarkan hal-hal yang baik, agama lain pun demikian pasti pengajarkannya hal-hal yang baik menerapkan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran di setiap perintah agama yang harus dilakukan. Nilai-nilai seperti itulah yang sesuai dengan konsep warga negara yang baik.

Imparsial mencatat, terjadi 24 kasus penutupan gereja sepanjang 2005. Pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan lainnya, selama 2005 sebanyak 12 kasus. Bentuknya, mulai dari penyesatan, penangkapan, hingga pelarangan beribadah. Sepanjang 2007 telah terjadi 135 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama berkeyakinan. Sementara itu, laporan PGI dan KWI, sejak 2004-2007, terjadi 108 kasus penutupan, penyerangan, dan perusakan gereja. Pada tahun 2009, dalam laporan tentang kebebasan beragama yang dirilis The Wahid Institute (2009) mencatat bahwa sepanjang tahun 2009, terjadi 35 pelanggaran kebebasan beragama, 93 tindakan intoleransi. Aparat kepolisian adalah pelaku terbanyak tindakan pelanggaran, sedang ormas keagamaan pelaku terbanyak tindakan intoleran. Laporan ini juga menyuguhkan banyaknya bermunculan peraturan yang dinilai diskriminatif. Setidaknya, ada enam perda bernuansa agama: Qanun Jinayah di Aceh, Perda Zakat di Bekasi, Perda Pelarangan Pelacuran di Jombang, Perda Pendidikan al-Quran di Kalimantan Selatan, Perda Pengelolaan Zakat di Batam, dan Perda Pengelolaan Zakat di Mamuju. Walikota Palembang, juga menekan surat bernomor 177

Tahun 2009, tentang Kewajiban Membayar Zakat bagi PNS di Kota Palembang. Pada tahun 2010 The Wahid Institute kembali merilis laporannya, hasilnya menyedihkan, kasus pelanggaran naik; dari 35 kasus, menjadi 63 kasus pelanggaran. Sedang intoleransi; dari 93 kasus, menjadi 133 kasus, atau naik 30 persen. Salah satu faktornya, menurut analisis The Wahid Institute adalah adanya pembiaran yang dilakukan negara.

Pada tahun 2011, ICRP mencatat bahwa ternyata aksi-aksi kekerasan dan diskriminasi yang dilakukan kelompok keagamaan tertentu, ternyata tak menurun. Aksi paling brutal menimpa jemaat Ahmadiyah di Cikeusik, pada 6 Februari 2011. Tiga orang tewas dengan cara biadab. Kasus ini, tragisnya, menyulut desakan pembubaran dan keputusan kepala daerah untuk melarang aktivitas Ahmadiyah. Sejumlah kebijakan muncul di Jawa Timur, Pandeglang, Jawa Barat, Depok, dan sejumlah wilayah lain. Selain itu, hasil survei Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP), Oktober 2010-Januari 2011, menyebut bahwa ternyata ada persoalan paling mendasar pada level kultural bangsa ini, yakni berkembangnya pemahaman radikal dan anti toleransi, yang sudah masuk ke ruang pendidikan. Dari 100 SMP serta SMA umum di Jakarta dan sekitarnya, dari 993 siswa yang disurvei, sekitar (48,9 persen) menyatakan setuju atau sangat setuju terhadap aksi kekerasan atas nama agama dan moral. Sisanya, (51,1 persen) menyatakan kurang setuju atau sangat tak setuju. Di antara 590 guru agama yang menjadi responden, (28,2 persen) menyatakan setuju atau sangat setuju atas aksi-aksi kekerasan berbaju agama.

Tantangan bias toleransi dalam meliputi isu-isu keagamaan relatif masih menuai soal. Hasil riset The International Journal of

Press dan Yayasan Pantau (2010), bertajuk “Misi Jurnalisme Indonesia: Demokrasi yang Seimbang, Pembangunan, dan Nilai-Nilai Islam”. masyarakat kehilangan kepercayaan dan kepuasan terhadap lembaga negara demikian rendah. Ketidakpuasan masyarakat atas Lembaga Kepresidenan mencapai 62,7%, ketidakpuasan terhadap Polisi 64,7 % dan ketidakpuasan terhadap partai politik 58,1%. Rendahnya kepuasan masyarakat atas tiga lembaga negara disebabkan kerja lambat, terkesan apatis, dan membiarkan dalam pelbagai kasus pelanggaran HAM kebebasan beragama di Indonesia. Sementara itu mendasarkan pada laporan tahunan kebebasan beragama dan berkeyakinan The Wahid Institute 2013 menyatakan bahwa selama Januari sampai Desember 2013, jumlah pelanggaran atau intoleransi keyakinan beragama berjumlah 245 peristiwa, terdiri dari 106 peristiwa (43%) yang melibatkan aktor negara dan 139 peristiwa (57%) oleh aktor non-negara. Sementara total jumlah tindakan kekerasan dan intoleransi mencapai 280, dimana 121 tindakan (43%) dilakukan aktor negara dan 159 tindakan (57%) oleh aktor non negara (The Wahid Institute Januari 2014).

Ancaman Intoleransi Di Wilayah Tasikmalaya

Hasil riset Setara Institute menunjukkan, jenis pelanggaran atas kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) yang paling banyak terjadi pada 2020 yakni tindakan intoleransi. Direktur Riset Setara Institute Halili Hasan menyebut, tindakan intoleransi banyak dilakukan oleh aktor non-negara, seperti kelompok warga, individu, ormas keagamaan, hingga Majelis Ulama Indonesia (MUI). Data tersebut mengungkapkan bahwa ada indikasi kurangnya masyarakat dalam memahami nilai-nilai Pancasila dan toleransi, ini merupakan

sesuatu hal serius yang perlu ditanggapi karena akan berdampak besar apabila hal tersebut dilakukan secara terus menerus dan tidak di tindak lanjuti

Genra Priangan (2019) mengungkapkan bahwa tingkat intoleransi umat beragama di daerah Tasikmalaya masih cukup tinggi seperti tindakan pelarangan bedah buku berdasarkan kelompok agama Islam tertentu, pelarangan renovasi gereja, anak-anak dari kelompok Islam Ahmadiyah dilarang untuk sekolah di Madrasah Diniyah, dan lain sebagainya. Senada dengan hal tersebut, Wahid Foundation (2017) mengungkapkan bahwa banyak warga/masyarakat Tasikmalaya yang melakukan tindakan intoleran terhadap kelompok Islam Ahmadiyah karena didasarkan pada perbedaan dari kelompok mayoritas yang ada di wilayah Tasikmalaya. Perbuatan mengusik, mencampuri urusan cara ibadah kelompok tertentu itu merupakan suatu tindakan intoleran, karena pada dasarnya setiap warga negara tidak terkecuali harus menyadari akan adanya perbedaan dan harus memahami akan nilai toleransi dan aktualisasi dari setiap nilai-nilai yang terkandung di Pancasila agar tidak salah tafsir maupun salah tindakan.

Berdasarkan beberapa kasus pelanggaran intoleran terhadap umat beragama membuktikan bahwa ada sebagian masyarakat Tasikmalaya yang masih memiliki sikap intoleran dan hal itu membuktikan bahwa ada sebagian warga Tasikmalaya yang belum mengerti akan toleransi umat beragama menghargai perbedaan, tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selain itu penanggulangan ancaman intoleransi di Kabupaten Tasikmalaya dikenal sebagai basis Darul Islam serta Masyumi pada masa lalu. Tasikmalaya merupakan bagian dari

daerah Jawa Barat yang akhir-akhir ini populer karena adanya penerapan perda syariah serta kehadiran berbagai organisasi basis Islam radikal. Implikasi dari perkembangannya berdampak pada keberadaan kelompok minoritas dalam organisasi Islam sendiri, yaitu kelompok Ahmadiyah dan Syiah. Dengan mengikuti fatwa dan keputusan di tingkat lebih atas, kedua kelompok ini dipermasalahkan dikarenakan dinilai sudah mengganggu arus besar di dalam (Mudzakkir, 2017). Kebijakan penerbitan perda yang berkaitan dengan penanggulangan ancaman intoleransi tersebut mengalami berbagai perubahan dengan seiring waktu, ada ketidaktepatan dalam membuat perda syariah dalam jangkauan masyarakat luas di Kabupaten Tasikmalaya yang pada dasarnya masyarakat Tasikmalaya memiliki keberagaman agama.

Sejarah mencatat bahwa Jawa Barat merupakan salah satu daerah yang pernah menjadi basis perjuangan untuk merebut kekuasaan dan mendirikan Negara Islam Indonesia (NII). Survey atau hasil penelitian awal menunjukkan bahwa sejumlah pesantren di Jawa Barat berpotensi menjadi basis tumbuhnya gerakan yang melahirkan kekerasan yang mengatasnamakan Islam. Penelitian awal juga menunjukkan bahwa Jamaah Islamiyah (JI), salah satu kelompok Islam garis keras yang berusaha mendirikan khilafah di Asia Tenggara juga menjadikan pesantren sebagai salah satu basis penanaman ideologi politik mereka (Dulkiah, 119: 2020).

Dengan penanaman nilai Pancasila yang terus menerus, intensif, massif, terkoordinasi dan terintegrasi dengan baik, akan membuat paham intoleransi menjadi mati dan tidak berkembang. Oleh sebab itu perlu sebuah kebijakan yang komprehensif dan terpadu dalam penanaman nilai-nilai Pancasila dan

UUD NRI 1945 sehingga hasilnya bisa lebih optimal. Kebijakan tersebut harus didukung oleh dengan langkah-langkah strategis dan upaya upaya teknis untuk melaksanakan strategi tersebut pada tingkat operasional (Tanamal dan Siagian, 2020: 46). Dengan kebijakan, strategi dan upaya yang lebih kongkrit, pemerintah dan jajarannya bersama masyarakat dapat bersinergi melakukan penanaman nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 sebagai bagian deradikalisasi dalam menghadapi intoleransi yang marak terjadi di lingkungan masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut.

Pertama, keberhasilan Pancasila mengenai hubungan antar umat beragama di Indonesia. Pembahasan kasus-kasus intoleransi dan penyederhanaan secara simultan klaim ekstremisme agama terhadap kelompok tertentu menunjukkan betapa kompleksnya situasi keagamaan di Indonesia. Toleransi berasal dari kata *tolerantia* yang bersifat atau bersikap menenggang, pendirian yang berbeda dan atau yang bertentangan dengan pendiriannya. Toleransi di sini bukan hanya dari aspek keagamaan saja, melainkan sangat luas, baik dari segi sosial, ekonomi, budaya, suku, ras dan kehidupan bermasyarakat pada umumnya. Jika ditarik kebelakang, pada hakikatnya bahwa Indonesia sudah sangat menyadari risiko yang akan muncul dari adanya keberagaman ini.

Kedua, Pancasila adalah ideologi dan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang termaktub dalam alenia keempat pembukaan UUD 1945. Pancasila memiliki nilai yang digali dari Indonesia,

artinya digali dan diambil dari kekayaan, rohani, moral dan budaya masyarakat dan bangsa Indonesia. Di sini Pancasila dikenal sebagai ideologi terbuka dalam arti bahwa Pancasila sebagai ideologi yang mampu mengikuti perkembangan jaman serta dinamis, merupakan sistem pemikiran terbuka dan merupakan hasil konsensus masyarakat itu sendiri. Untuk itu Pancasila juga merupakan dasar negara yang sudah barang tentu harus terwujud dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila hadir diharapkan menjadi suatu dasar atau landasan dalam berkehidupan dan menjawab segala tantangan apalagi di era sekarang seperti saat ini.

Ketiga, konsep perbedaan telah dirumuskan jauh sebelum negara Indonesia lahir yang ditulis dalam Kitab Sutasoma karya Mpu Tantular sebagai salah satu kaum intelektual pada zaman kerajaan Majapahit. Konsep bhinneka atau perbedaan yang diciptakan oleh begawan besar dalam Kitab Sutasoma kemudian diadopsi oleh para pendiri negara pada saat kemerdekaan bangsa Indonesia. Sikap toleran harus ditegakkan untuk melawan sikap anti toleran atau intoleran yang semakin berkembang. Bhinneka Tunggal Ika dijadikan dasar dalam upaya membina kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana tercantum dalam Garuda Pancasila sebagai lambang negara. Intoleransi muncul karena adanya pluralisme yang disebabkan oleh faktor teologis sebagai keyakinan yang sangat kuat dalam pribadi masing-masing warga negara. Agama diyakini sebagai kebenaran yang hakiki sehingga segala sesuatu di luar keyakinannya adalah salah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwilaga, R., 2017, "Puritanisme dan Fundamentalisme Dalam Islam Transnasional Serta Implikasinya Terhadap Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa", dalam *Journal of Governance*. Vol 2, No. 1, hh.126-145.
- Alfaqi, M, Z., M. M. Habibi, D.S. Rapita, 2017, "Peran Pemuda Dalam Upaya Pencegahan Korupsi dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah (Studi Di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta)". Dalam *Jurnal Ketahanan Nasional*. Vol 23 No. 3, hh. 320-337.
- Amir, S dan A. Hakim, 2018, "Pencegahan Sikap Intoleransi Pada Siswa Melalui Penguatan Pendidikan Pancasila (Studi Kasus Sma Paba Binjai)". Dalam *Seminar Nasional Pendidikan Dasar*
- Arifin, Z., E.P. Handayani, dan S. Virdaus, 2022, "Deradikalisasi Pluralisme Pemahaman Terhadap Ideologi Pancasila Melalui Media Sosial". Dalam *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Vol 7, No. 1, hh. 161-170.
- Cresswell, 2016, *Research design: pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran*. Penerjemah Ahmad Fawaid & Rianayati Kusmini. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Dulkiah, M., 2020, "Pengaruh Ideologi Terhadap Sikap radikal Pimpinan Pondok Pesantren Di Tasikmalaya", dalam *Jurnal Akselerasi: Jurnal Ilmiah Nasional*. Vol 2, No. 3, hh. 118-127.
- Farid, M., 2018, "Religious Intolerance and the Problematic of Religious Radicalism in Indonesia". *International Seminary*.
- Febriani, R., Waldi, A., Mbeo, N, P, 2021, "Urgensi Pendidikan Multikultural Pada

- Masyarakat Homogen Demi Menjaga Ketahanan Negara Bangsa (Studi Kasus Video Viral Pemakaian Jilbab Di SMK Di Padang)”. Dalam *Jurnal Ketahanan Nasional*. Vol 27 No.2, hh 208-229.
- Febrihananto, E.W. I. Abdullah, dan A. Zubaidi, 2017, “Partisipasi Pemuda Purna Paskibraka Indonesia Dalam Kegiatan Bela Negara Dan Pengaruhnya Terhadap Ketahanan Wilayah (Studi Tentang Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah)”. Dalam *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol 23, No. 1, hh. 68-85
- Gentrapriangan, 2019, *Pelanggaran HAM di Tasikmalaya 2019, Apa saja?*. <<https://gentrapriangan.com/pelanggaran-ham-di-tasikmalaya-selama-2019-apa-saja/>>, diakses pada hari Jumat 16 September 2022, Pukul 20.52 WIB.
- Hobolt, S, B., W.V.D. Brug, H.G. Boomgaarden, dan M.C. Hincrichsen, 2011, “Religious intolerance and Euroscepticism”. Dalam *Jurnal European Unions Politics*, Vol 12, No. 3, hh. 359-379.
- Irawan, H., dan K.B. Firdaus, 2021, Resiliensi Pancasila Di Era Disrupsi: Dilematis Media Sosial Dalam Menjawab Tantangan Isu Intoleransi”. Dalam *Jurnal Paris Langkis*. Vol 1, No. 2, hh. 36-47.
- Karsayuda, H, M, R, dan R.I. Tektona, 2021, “Ketahanan Ideologi Pancasila Dalam Menghadapi Distrupsi Revolusi Industri 4.0”. dalam *Jurnal Ketahanan Nasional*. Vol 27, No.1, hh. 112-129.
- Kompas.com, 2021, *Riset Setara Institute: Intoleransi atas Kebebasan Beragama-Berkeyakinan Paling Banyak Terjadi Pada 2020*. <<https://nasional.kompas.com/read/2021/04/06/18065451/riset-setara-institute-intoleransi-atas-kebebasan-beragama-berkeyakinan>>, diakses pada hari Jumat 16 September 2022, Pukul 21.00 WIB
- Maharani, S, D., Surono., H.Sutarmanto, dan A. Zubaidi, 2019, “Indeks Ketahanan Ideologi Pancasila”. Dalam *Jurnal Ketahanan Nasional*. Vol 25, No. 2, hh. 277-294.
- Mubarak, M, Z., 2015, Dari NII Ke ISIS Transformasi Ideologi Gerakan dalam Islam Radikal di Indonesia Kontemporer. *Episteme*. Vol. 10, No. 1, hh. 77-98.
- Mudzakkir, A, 2017, “Konservatisme Islam dan Intoleransi Keagamaan di Tasikmalaya”. Dalam *Jurnal Multikultural & Multireligius*. Vol 16 No. 1, hh. 57-74.
- Nusabaum, M, 2014, “Religious Intolerance”. Dalam *Jurnal Foreign Policy*, Vol, No. 144, hh. 44-45.
- Pamungkas, C, 2018, “Mencari Bentuk Rekonsiliasi Intra Agama Analisis Terhadap Pengungsi Syiah Sampang dan Ahmadiyah Mataram, dalam *Jurnal Episteme*. Vol 13 No. 1, hh 137-147.
- Qodir, Z, 2016, Kaum Muda, Intoleransi, dan Radikalisme Agama. Dalam *Jurnal Studi Pemuda*, Vol 5, No. 1, hh. 429-445.
- Rukmana, I, S., Samsuri., D.Wahidin, 2020, “Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Contoh Nyata Ketahanan Ideologi (Studi di Kampung Pancasila, Dusun Nogosaro, Desa Tirirenggo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)”. Dalam *Jurnal Ketahanan Nasional*. Vol 26, No. 2, hh. 182-203.
- Rusnaini, Raharjo, A.Suryaningsih, dan W.Noventari, 2021, “Intensifikasi Profil Pelajar Pancasila dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Pribadi Siswa”. Dalam *Jurnal Ketahanan Nasional*. Vol 27, No. 2, hh. 230-249.

- Setialaksana, N., A. Saputra, dan R.F. Gustaman, 2019, *Pendidikan Pancasila*. Ciamis: Media Priangan Abadi.
- Shofa, M, N, 2017, “Penanaman Pendidikan Karakter Untuk Anak Usia Dini”, Dalam *Jurnal ThufuLA*. Vol.5, No. 1, hh 64-78.
- Siagian, S, B, U., 2020, “Nilai- Nilai Pancasila Dalam Menangani Intoleransi Di Indonesia”. Dalam *Jurnal Teologi Biblika*. Vol 5, No. 1, hh. 36-45.
- Subagyo, A, 2020, Implementasi Pancasila Dalam Menangkal Intoleransi, Radikalisme Dan Terorisme, Dalam *Jurnal Kontal Keilmuan*. Vol 6, No. 1, hh. 10-24.
- Sunstein, I, C R,dan M.C. Nussbaum, 2004, “Beyond’ compassion and humanity: Justice for nonhuman”. Dalam *Jurnal Oxford University Press*, hh. 299-320.
- Tanamal, N, A., S.B.U. Siagian, 2020, “Implementasi Nilai Pancasila Dalam Menangani Intoleransi Di Indonesia”. Dalam *Jurnal Lemhannas RI*. Vol 8, No. 3, hh 408-425.
- The International Journal of Press dan Yayasan Pantau, 2010.
- The Wahid Foundation, 2017, *Dinamika Diskusi Toleransi di Tasikmalaya*, <<https://wahidfoundation.org/index.php/news/detail/Dinamika-Diskusi-Toleransi-di-Tasikmalaya>>, diakses pada hari jumat 16 September 2022, Pukul 21.00 WIB
- The Wahid Institute. 2009. *Ringkasan Eksekutif*. <https://wahidinstitute.org/wi-id/images/upload/dokumen/laporan_kebebasan_beragama_wahid_institute_2009.pdf>. diakses pada hari jumat 04 November 2022, Pukul 22.00 WIB.
- The Wahid Institute. 2010. *Ringkasan Eksekutif*. <https://wahidinstitute.org/wi-id/images/upload/dokumen/full_report_annual_wi_2010.pdf>. diakses pada hari jumat 04 November 2022, Pukul 22.00 WIB.
- The Wahid Institute, 2014, *Kekerasan Bernuansa Keagamaan di Indonesia*.